



SPBE

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMROV SULBAR



SPBE Makro Pemerintah Provinsi



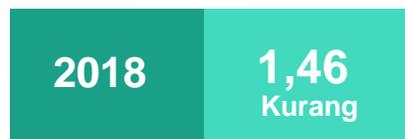
Capaian SPBE

Hasil evaluasi penilaian oleh Kemenpan-RB

Indeks SPBE Pemprov Sulbar



Max poin 5,00



Urutan indeks SPBE Pemerintah Provinsi 2021

Rank	Nama Instansi	Indeks SPBE
1	Pemerintah Provinsi Bali	3,68
2	Pemerintah D.I. Yogyakarta	3,49
3	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3,47
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,28
5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,26
6	Pemerintah Aceh	3,19
7	Pemerintah Provinsi Banten	3,15
8	Pemerintah Provinsi NTB	2,94
9	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2,82
10	Pemerintah Provinsi Bengkulu	2,79
11	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2,77
12	Pemerintah Provinsi Lampung	2,76
13	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2,74
14	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2,69
15	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2,62
16	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,60
17	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,60
18	Pemerintah Provinsi Riau	2,55
19	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2,51
20	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2,38
21	Pemerintah Provinsi NTT	2,28
22	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2,26
23	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,22
24	Pemerintah Provinsi Jambi	2,21
25	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2,05
26	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,04
27	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2,04
28	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1,96
29	Pemerintah Provinsi Maluku	1,93
30	Pemerintah Provinsi Papua	1,80
31	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1,38
32	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1,05
33	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1,00
34	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	1,00

Indeks SPBE Sulbar 2021

Permenpan-RB 59/2020

4 Domain SPBE

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,04
Domain Kebijakan SPBE	1,50
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,50
Domain Tata Kelola SPBE	1,60
Perencanaan Strategis SPBE	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,50
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,67
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,17

10 indikator

10 indikator

11 indikator

16 indikator

No	47 Indikator SPBE	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2

5 Tantangan Utama SPBE Pemprov Sulbar

1

Infrastruktur TIK belum lengkap

Koneksi jaringan intra : 77%
Dukungan perangkat : 65%



3

Belum ada masterplan SPBE

Progres penyusunan: 20%



2

Aplikasi pendukung urusan tersedia sedikit dan data belum terintegrasi

Aplikasi umum (aspek manajerial) : 50%
Aplikasi khusus (32 urusan pemprov) : 37,5%



4

SDM terbatas

Kuantitas: 60%
Kualitas: 33%



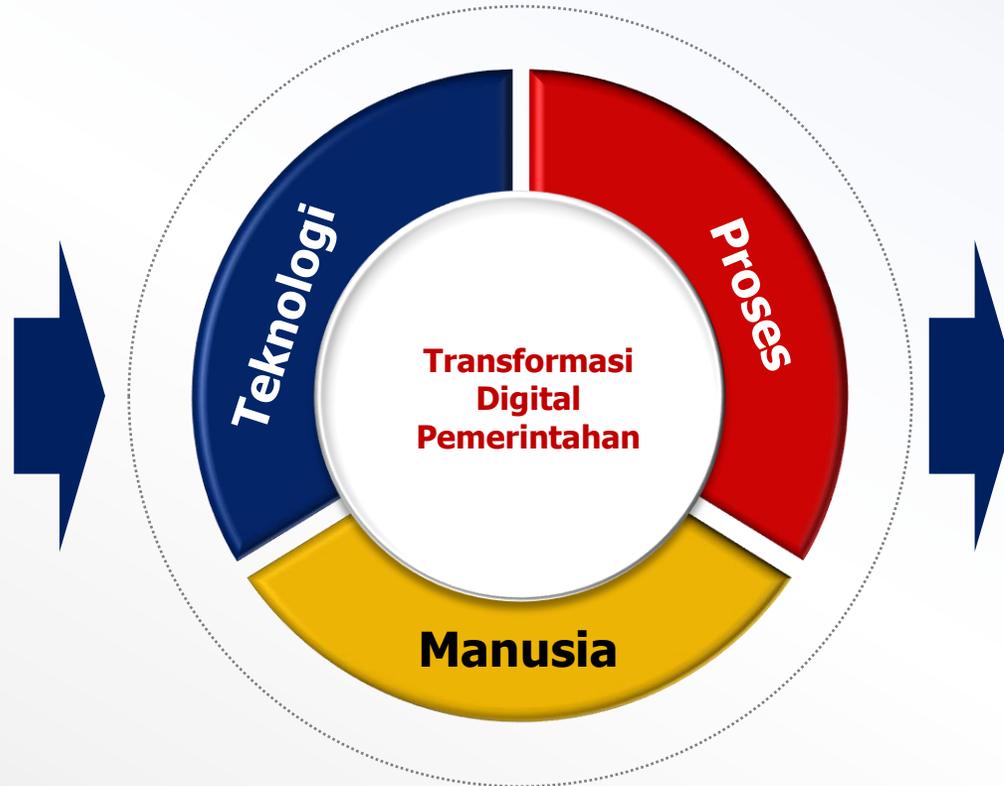
5

Keberpihakan Kebijakan belum optimal

Penganggaran 2021 : 8% dari total kebutuhan



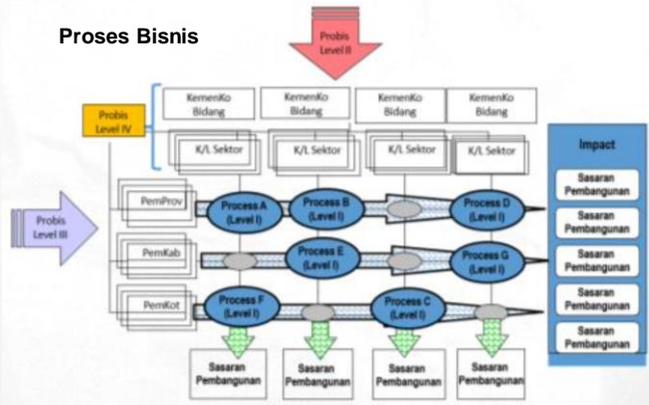
Arah Kebijakan SPBE



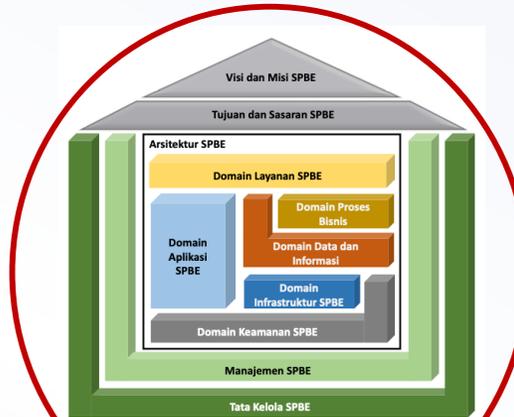
SPBE Terintegrasi



Smart Government 4.0

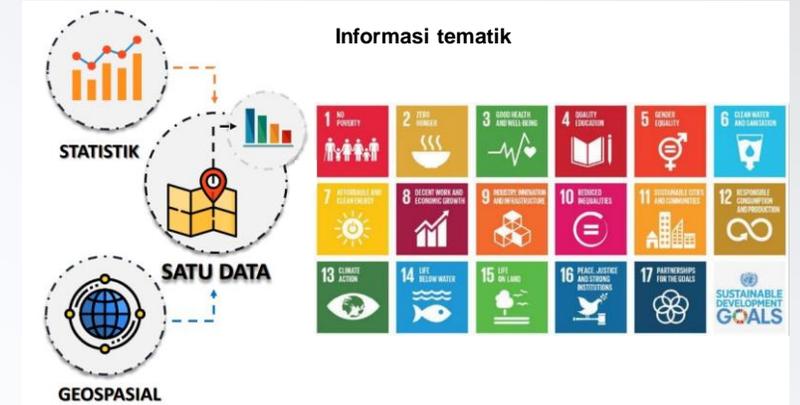


SISTEM PEMERINTAHAN



BERBASIS ELEKTRONIK

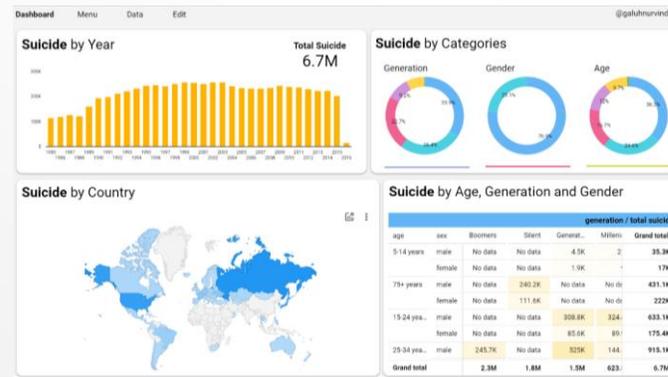
SPBE



SATU DATA



KEPUTUSAN



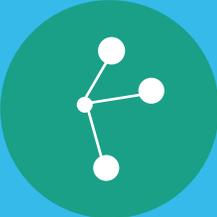
DASHBOARD INFORMASI PIMPINAN

Item Capaian Pelaksanaan SPBE Sulbar

- 1. Jaringan Fiber Optic**
- 2. Maintenance Teknis SPBE**
- 3. Data Center**
- 4. Rencana Induk SPBE**
- 5. Akses Internet**
- 6. Pengembangan dan Manajemen SDM**
- 7. Tata Kelola**
- 8. Website & Domain**
- 9. Aplikasi & Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**
- 10. Network Operation Center (NOC)**
- 11. Monitoring dan Evaluasi SPBE**
- 12. Jaringan Intra Penghubung Pemprov ke Pemkab**
- 13. WiFi Corner**
- 14. Mobile Internet**
- 15. Command Center**
- 16. Internet Desa Marasa**

Jaringan Kabel Fiber Optik

42 OPD + 7 Rujab



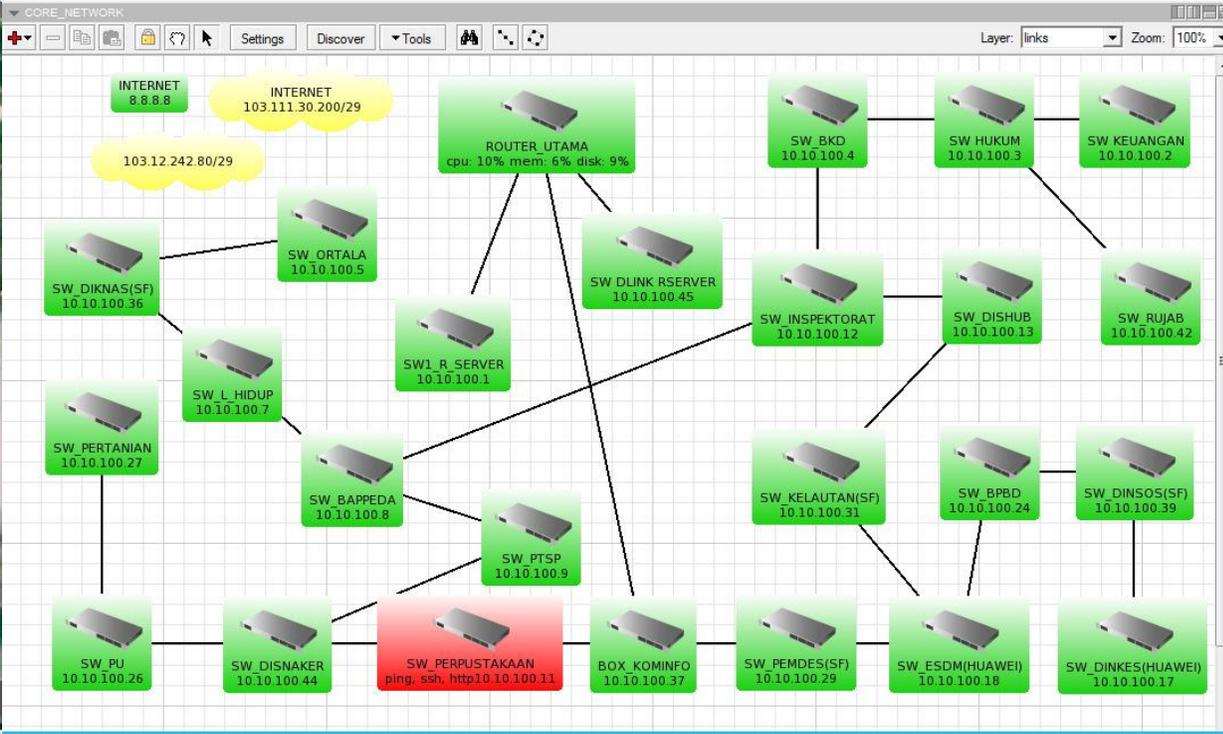
TERSAMBUNG

36 OPD dan 1 Rujab



BELUM TERSAMBUNG

5 OPD dan 6 Rujab



Maintenance Teknis SPBE

KEBUTUHAN PERALATAN DAN MAINTENANCE JARINGAN OPD 37 GEDUNG:

- ◆ Penyediaan perangkat baru : 12 gedung
- ◆ Upgrade perangkat : 25 gedung
- ◆ Penguatan sistem keamanan digital : 5 perangkat
- ◆ Memenuhi kebutuhan insidental/temporary network
- ◆ Peralatan kerja belum lengkap



Data Center

Pemprov belum memiliki data center yang memenuhi standar

Jumlah server total 34 unit dengan kapasitas 42,6 TB



**Pusat data Kominfo
17 Unit, Kapasitas 22,2 TB**



**Tersebar di kantor OPD
17 Unit, Kapasitas 20,4 TB**

(BPKPD, Biro Umum, Dikbud, BPBD, RSUD, Perpus & arsip, DPMPTSP, ESDM)

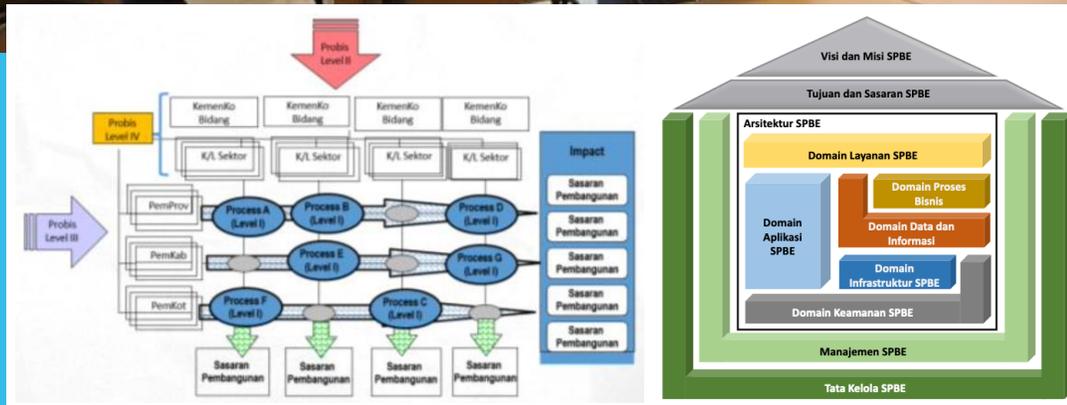


Rencana Induk SPBE



Pemprov. Sulbar belum memiliki masterplan/rencana induk SPBE. Tahun 2021 telah dibuat MoU dan PKS dengan CfDS (Central for Digital Society) UGM untuk membuat dokumen arah pembangunan SPBE antara lain:

- 2022** Penyusunan arsitektur SPBE
- 2023** Penyusunan tata kelola informasi, penyiapan ISO 27001 & pendampingan penyusunan peta proses bisnis
- 2024** Pendampingan penyusunan manajemen resiko, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan & manajemen layanan



Rencana induk merupakan arah kebijakan dan panduan tertulis penerapan SPBE terintegrasi yang berguna untuk efektifitas kerja birokrasi dalam manajemen pemerintahan dan pemberian layanan publik serta media mewujudkan bigdata menuju "Provinsi Cerdas Sulawesi Barat"

Proses bisnis pemerintahan dan arsitektur SPBE

Akses Internet

Disediakan terintegrasi dan terdistribusi oleh Diskominfo ke semua gedung OPD dan rujab

**Kebutuhan ideal :
1.000 Mbps (2 provider)**

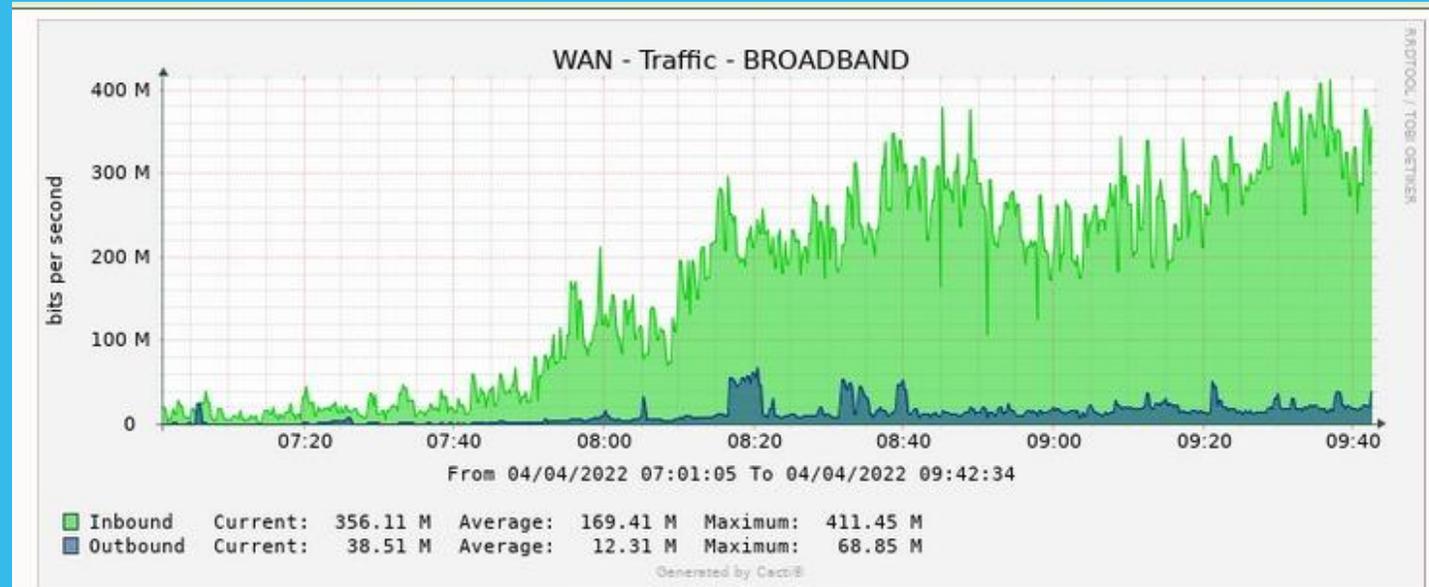
Langganan bandwidth saat ini :

- 500 Mbps broadband 1:4 internasional (akses internet)
- 20 Mbps dedicate 1:1 internasional (untuk server)

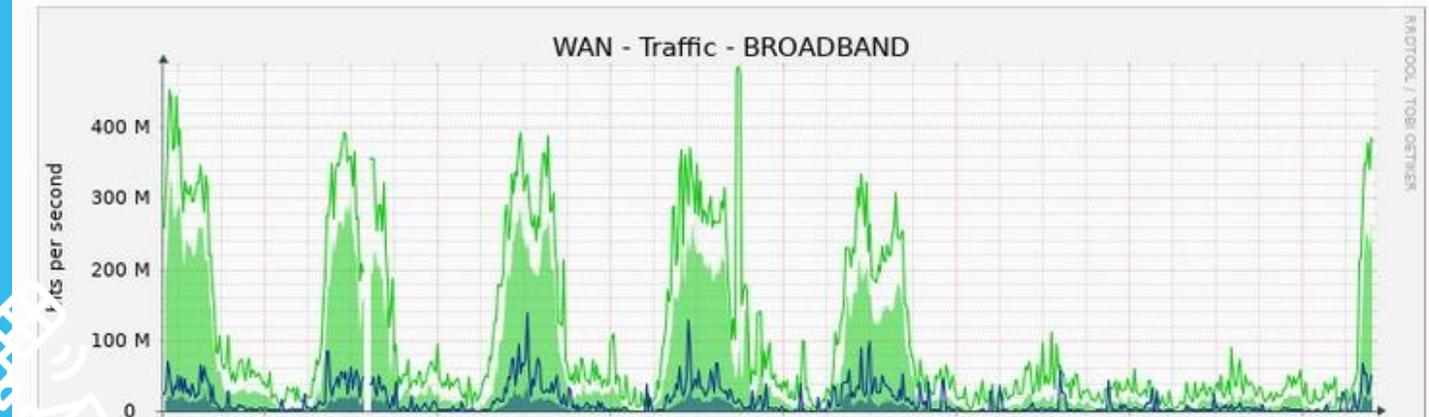
Digunakan bersama 40 OPD dan 2 Rujab.

Pengguna:

ASN **3.930 Orang** + PTT **3.106 Orang**
= **7.036 Orang** (data BKD Prov Sulbar 2021)



Daily (10 Second Average)



Pengembangan dan Manajemen SDM



Pemprov. Sulbar memiliki SDM bersertifikasi :

17 orang pada 7 keahlian

- GCIO
- Sistem Analis
- Network Analis
- Programer
- Teknisi Jaringan
- Desain Grafis
- Video Editor

yang bertugas di Dinas Kominfo.

50% OPD sudah memiliki SDM TIK, meskipun kualitasnya perlu distandarisasi melalui sertifikasi teknis pada bidang:

- Jaringan
- Multimedia
- Aplikasi
- Website





TIM TEKNIS SPBE PEMPROV SULBAR



Muhammad Ridwan Djafar, SIP, M.Si
GCIO (Government Chief Information Officer)



Taufan Hary Prasetyo, M.Ec. Dev., M.Kom
Kordinator TIM



TRANSFORMASI DIGITAL

DIVISI APLIKASI



Hafriansyah HF Adanai, S.Kom
Kepala Divisi Aplikasi



Ganjar Adi Kinara, Amd.Kom
Desain Aplikasi



Bambang Sulistyso, S.Kom
Frontend Programmer



Irhadi, S.Kom
Backend Programmer

DIVISI JARINGAN



Madhur, ST
Kepala Divisi Jaringan



Budi Arianto, Amd.Kom
Arsitek Jaringan



Muh. Nurhidayat, S.Kom
Instalator Jaringan



Muh. Fadly Jashar, ST
Perawatan Jaringan

DIVISI MULTIMEDIA



Omar Qasash, S.Kom
Kepala Divisi Multimedia



Muh. Azwar Anwar, S.Kom
Streaming dan Broadcasting



Rahmat, Amd.Kom
Desain Grafis



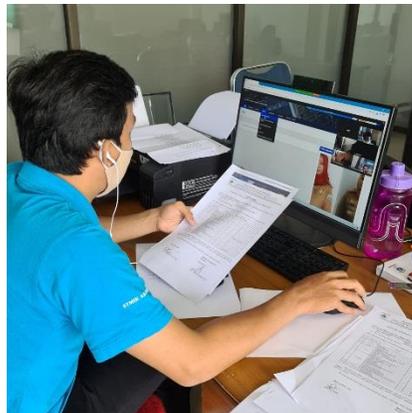
Reuni Rahmat, Amd.Kom
Video Editor



DIVISI APLIKASI



Pengelolaan Website



Pembangunan Aplikasi



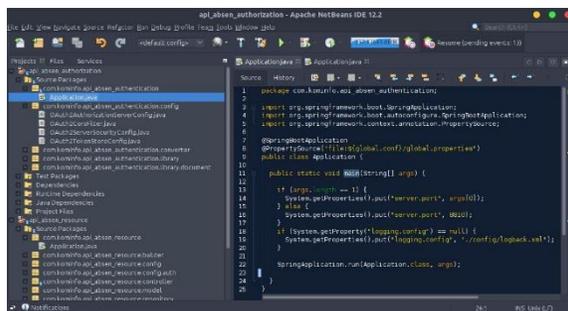
Sub Domain



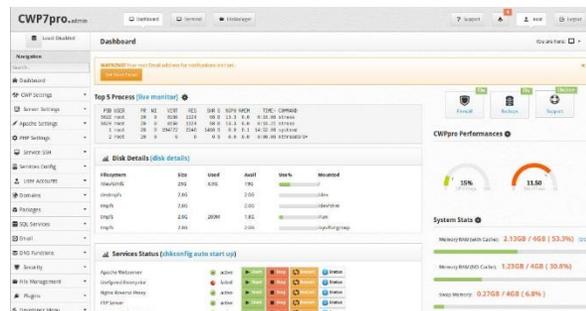
Konsultasi Helpdesk



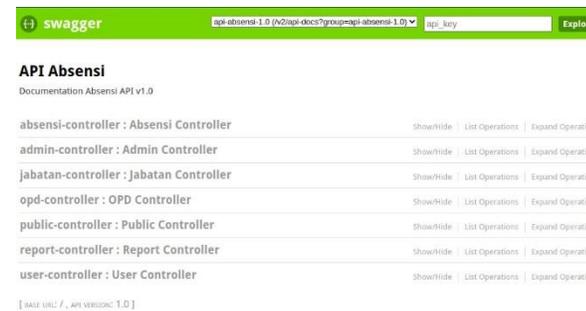
Bimbingan SDM



Rekayasa Software



Hosting Aplikasi dan Web



Email.go.id



DIVISI JARINGAN



Akses point to point



Manajemen Server



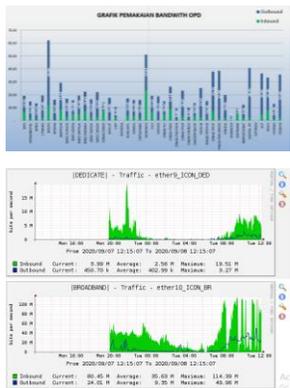
Bimbingan SDM



Data Security



Maintenance Jaringan FO



Bandwidth Internet



Konsultasi Helpdesk

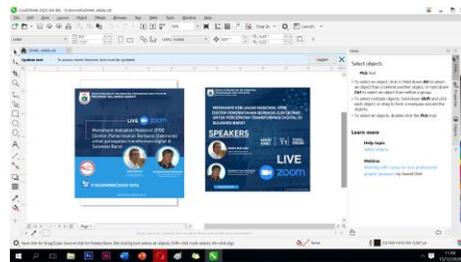
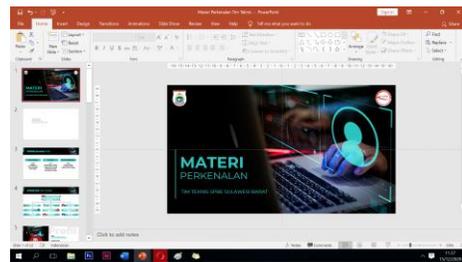


Instalasi Jaringan Kantor OPD



Kemanan Jaringan

DIVISI MULTIMEDIA



Desain User Interface

Desain Presentasi, Flyer, Baligho, Cover



Desain Infografis



Liputan Video Animasi, Cinematic



Bimbingan SDM



Konsultasi Helpdesk

Tata Kelola

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 188.4/500/SULBAR/XII/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TIM ASESOR INTERNAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris
4.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengelolaan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengolahan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Tenaga Ahli Gubernur Bidang Teknologi Informasi	Anggota

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,


MUHAMMAD IDRIS

Tim Koordinasi SPBE Pemprov Sulbar sebagai pelaksana SPBE belum sinergi dalam penyelenggaraan SPBE

Pelaksanaan SPBE masih dianggap hanya domain tugas Dinas Kominfo

Sistem kerja dan proses bisnis Pemprov Sulbar belum tersedia lengkap sebagai dasar penyelenggaraan SPBE terintegrasi

Peran Kominfo: Menyiapkan daya dukung TIK untuk melaksanakan layanan SPBE yang efektif baik Aplikasi, Infrastruktur dan SDM

Tim Koordinasi SPBE Pemprov Sulbar



Website & Domain



Jumlah website : 58

◆ Website instansi

- 2 website utama: Pemprov & DPRD
- 42 website OPD

◆ 14 website urusan Non OPD

Domain & Sub Domain

1 domain (<http://sulbarprov.go.id>)
118 sub domain (58 website dan 60 aplikasi)

Penyajian tampilan dan informasi belum optimal Perlu peningkatan kemampuan pengelolaan website secara profesional



Aplikasi & Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Aplikasi layanan dan sistem informasi saat ini masih beroperasi secara parsial, belum terintegrasi sistem dan databasenya

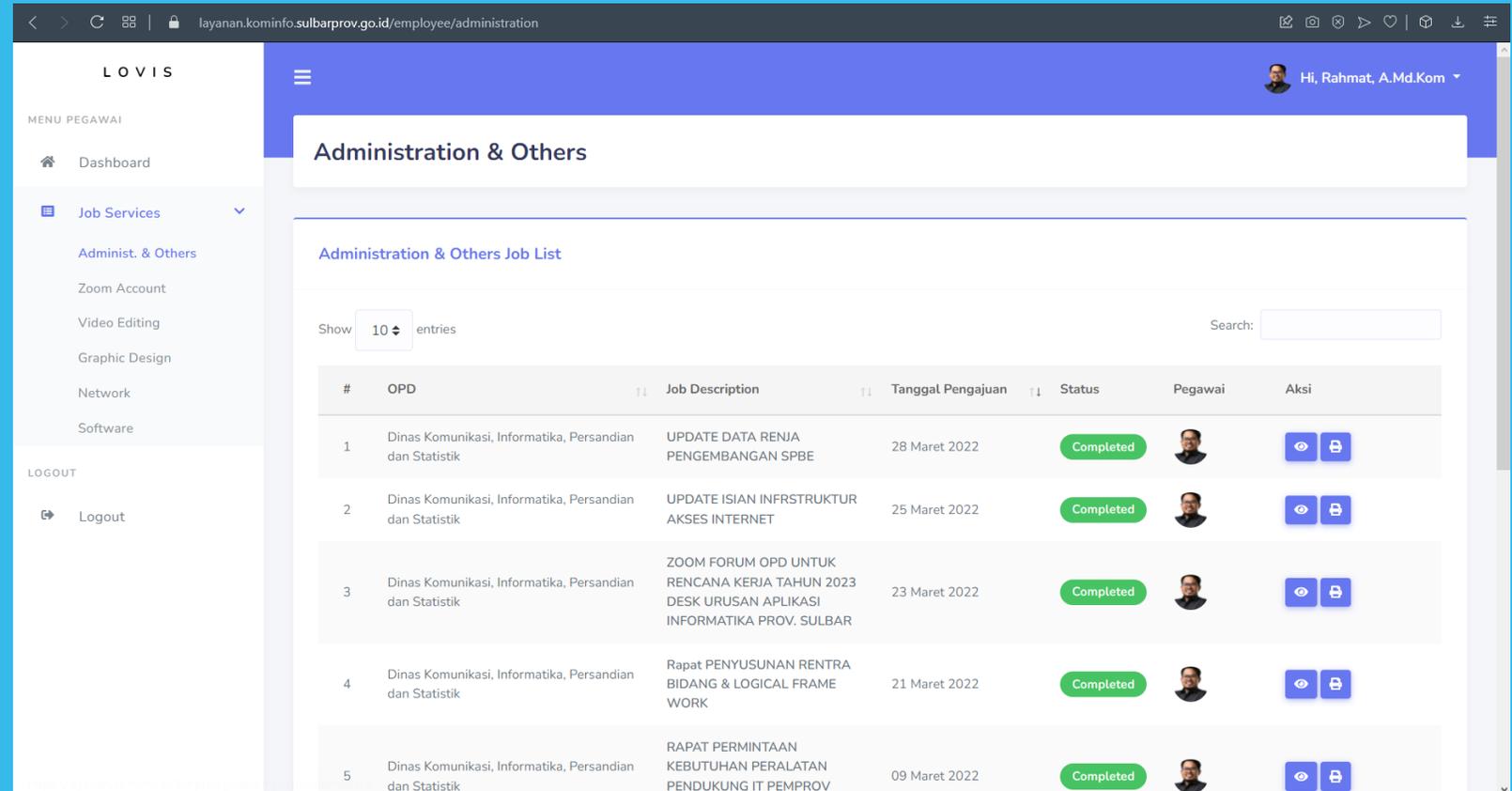
Aplikasi umum digunakan :
4 jenis (SIPD perencanaan, SIPD Keuangan, SPSE & SP4N Lapor)

Aplikasi khusus : 109 jenis

◆ INTERNAL – 60 Aplikasi (Server lokal)

- 30 Aktif
- 30 Pasif

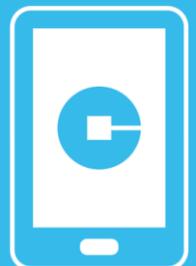
◆ EKSTERNAL 49 Aplikasi (Server luar)



The screenshot shows a web application interface for 'LOVIS' with a sidebar menu and a main content area. The sidebar menu includes 'Dashboard', 'Job Services', 'Administ. & Others', 'Zoom Account', 'Video Editing', 'Graphic Design', 'Network', 'Software', and 'Logout'. The main content area displays 'Administration & Others' with a table of job entries. The table has columns for '#', 'OPD', 'Job Description', 'Tanggal Pengajuan', 'Status', 'Pegawai', and 'Aksi'. All entries in the table have a 'Completed' status.

#	OPD	Job Description	Tanggal Pengajuan	Status	Pegawai	Aksi
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	UPDATE DATA RENJA PENGEMBANGAN SPBE	28 Maret 2022	Completed		
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	UPDATE ISIAN INFRASTRUKTUR AKSES INTERNET	25 Maret 2022	Completed		
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	ZOOM FORUM OPD UNTUK RENCANA KERJA TAHUN 2023 DESK URUSAN APLIKASI INFORMATIKA PROV. SULBAR	23 Maret 2022	Completed		
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Rapat PENYUSUNAN RENTRA BIDANG & LOGICAL FRAME WORK	21 Maret 2022	Completed		
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAPAT PERMINTAAN KEBUTUHAN PERALATAN PENDUKUNG IT PEMPROV	09 Maret 2022	Completed		

SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) belum digunakan



Network Operation Center (NOC)



Pemprov. Sulbar belum memiliki fasilitas NOC

Dipersiapkan 1 ruangan di lantai 4 gedung baru gabungan dinas

NOC merupakan media pemantauan jaringan koneksi antar kantor dan akses keluar diperlukan untuk kecepatan deteksi dan penanganan



Monitoring dan Evaluasi SPBE

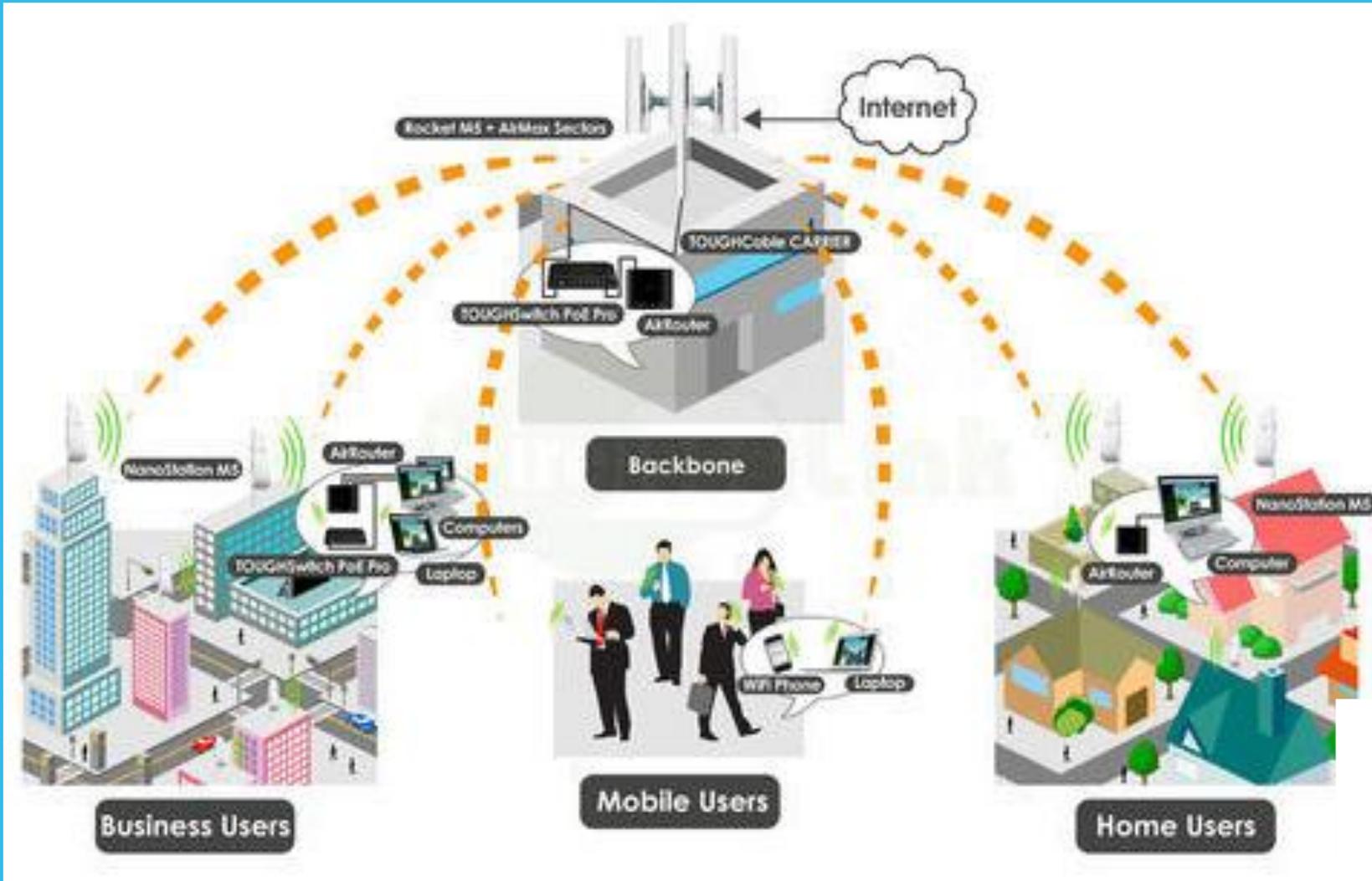
Penerapan SPBE masih lemah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Terbukti dalam hasil evaluasi SPBE nasional pemda se-Sulbar seluruhnya masih di bawah Indeks 3.0

Capaian indeks SPBE 2021:

- Pemprov Sulbar 2,04 (cukup)
- Kabupaten Polman 2,71 (baik)
- Kabupaten Mamuju 1,52 (kurang)
- Kabupaten Majene 1,52 (kurang)
- Kabupaten Mamasa (tidak mengikuti evaluasi)
- Kabupaten Pasangkayu (tidak mengikuti evaluasi)
- Kabupaten Mateng (tidak mengikuti evaluasi)



Jaringan Intra Penghubung Pemprov. ke Pemkab



Pemprov. Sulbar belum memiliki koneksi jaringan intra pemerintah daerah ke kabupaten

Perlu dibangun segera koneksi digital tertutup pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten



WiFi Corner

**Pemprov. Sulbar
belum memiliki wifi
corner dalam
kompleks perkantoran
Gubernur**

**Sarana kerja outdoor
yang terkoneksi
internet dan fasilitas
kerja interaktif**



Mobile Internet



Fasilitas *layanan internet mobile* belum tersedia

Layanan internet keliling akan berfungsi sebagai penyedia akses informasi dan video conference yang dibutuhkan setiap saat dan di lokasi manapun termasuk wilayah *blank spot area*



Command Center

Command center & executive lounge belum tersedia

Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk dashboard informasi digital yang terintegrasi dalam membantu kemudahan pengambilan keputusan pimpinan dan mendukung "Provinsi Cerdas Sulawesi Barat"



Internet Desa Marasa



Jaringan FO - 2019
(32 Desa, 6 Kabupaten)

POLEWALI MANDAR

1. Balanipa (Desa Mosso, Desa Tamajarra)
2. Campalagian (Desa Katumbangan)
3. Mapilli (Desa Rappang Barat)
4. Tinambung (Desa Galung Lombok, Desa Lekopadis)
5. Limboro (Desa Napo)
6. Matangnga (Desa Katimbang)

MAJENE

1. Tammero'do Sendana (Desa Tammero'do)
2. Malunda (Desa Lombang)
3. Ulumanda (Desa Sambado)
4. Banggae Timur (Desa Buttu Baruga)
5. Banggae (Desa Pamboborang)

MAMASA

1. Mamasa (Desa Tondok Bakaru)
2. Balla (Desa Balla Satanetean)
3. Bambang (Desa Minanga)
4. Aralle (Desa Ralleanak)
5. Mambi (Desa Sendana)

MAMUJU

1. Simboro (Desa Botteng Utara)
2. Tapalng (Desa Rante Doda)
3. Sampaga (Desa Losso)
4. Tapalang Barat (Desa Lebani)
5. Kalukku (Desa Pammulukang)

PASANGKAYU

1. Baras (Desa Balanti)
2. Bambaira (Desa Kalukunangka)
3. Bambalamotu (Desa Wulai)
4. Pedongga (Desa Martasari)

MAMUJU TENGAH

1. Pangale (Desa Lemo-Lemo)
2. Karossa (Desa Kambunong)
3. Topoyo (Desa Sinabatta)
4. Tobadak (Desa Sloada)
5. Karossa (Desa Sanjango)



Jaringan VSAT
(4 Desa, 2 Kabupaten)

MAMUJU

1. Balabalakang (Desa Balabalakang Timur)
2. Salutiwo (Kecamatan Bonehau)
3. Karataun (Kecamatan Kalumpang)

MAMASA

1. Pana (Desa Manipi)



Kebutuhan Pembiayaan SPBE Provinsi

URAIAN		TOTAL	KETERANGAN
1.	Kebutuhan Jaringan Fiber Optic	Rp. 1.013.958.000	Investasi awal 1 kali
2.	Kebutuhan Maintenance Teknis SPBE	Rp. 1.709.445.000	Investasi awal 1 kali dan sebagian rutin setiap tahun
3.	Pembiayaan Rencana Induk SPBE	Rp. 800.000.000	Investasi awal 1 kali
4.	Penyediaan Akses Internet	Rp. 3.226.000.000	Rutin setiap tahun
5.	Pengembangan dan Manajemen SDM	Rp. 2.450.000.000	Rutin setiap tahun
6.	Tata Kelola	Rp. 2.104.000.000	Rutin setiap tahun
7.	Sertifikasi Teknis	Rp. 1.179.180.000	Investasi awal 1 kali
8.	Pengembangan Website	Rp. 347.500.000	Rutin setiap tahun
9.	Pengelolaan Aplikasi & Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp. 347.500.000	Rutin setiap tahun
10.	Pembuatan Network Operation Center (NOC)	Rp. 377.310.000	Investasi awal 1 kali
11.	Peningkatan Kualitas & Monev SPBE	Rp. 347.500.000	Rutin setiap tahun
12.	Jaringan Penghubung Pemprov ke Pemkab	Rp. 743.000.000	Investasi awal 1 kali
13.	Pembangunan WiFi Corner	Rp. 285.000.000	Investasi awal 1 kali
14.	Penyediaan Mobile Internet	Rp. 1.695.000.000	Investasi awal 1 kali
15.	Peralatan Command Center	Rp. 4.497.675.100	Investasi awal 1 kali
TOTAL		Rp. 21.123.068.100	

Dukungan SPBE Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



Evaluasi SPBE Tahun 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 70

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.



8 aspek penilaian internal dukungan pelaksanaan SPBE OPD Pemprov Sulbar Tahun 2021



Peralatan Jaringan Internal

Website

Aplikasi

e-Mail go.id

SDM Talenta digital

Sosial Media

Penerapan QR Code Peduli Lindungi

Peralatan Video Conference

Bobot : 30

(Bobot SANGAT TINGGI karena infrastruktur jaringan sangat mendasar dalam pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

30 poin

SESUAI STANDAR
(sudah memenuhi rekomendasi teknis & jumlah minimal perangkat yg disarankan Diskominfo)

5 poin

BELUM SESUAI
(sudah memiliki perangkat tapi belum memenuhi rekomendasi kualitas & jumlah)

Bobot : 20

(Bobot CUKUP TINGGI karena media informasi dan interaksi yang wajib kpd publik dalam pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

20 poin

BAIK
(25 indikator konten web terisi, update informasi & tampilan menarik)

10 poin

CUKUP
(25 indikator konten web terisi tapi belum update, tampilan secukupnya)

5 poin

KURANG
(25 indikator konten web belum terisi dan tampilan msh blm di upgrade)

Bobot : 10

(Bobot SEDANG karena merupakan sistem informasi digital yang utama dalam kinerja pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

10 poin

AKTIF
(Ada aplikasi dan seluruhnya aktif dikelola)

5 poin

AKTIF SEBAGIAN
(Ada aplikasi yang dikelola tp sebagian pasif)

2 poin

TIDAK AKTIF
(Ada aplikasi yang dikelola tp pasif atau tidak punya aplikasi, hanya sbg pengguna)

Regulasi Aplikasi

Bobot : 5

(Bobot RENDAH karena merupakan wujud kebijakan yang menjadi dasar penggunaan aplikasi pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

5 poin

ADA LENGKAP
(Semua aplikasi yang dikelola memiliki regulasi pelaksanaan –Pergub/SK Gub/SOP)

3 poin

ADA SEBAGIAN
(sebagian aplikasi yang dikelola memiliki regulasi pelaksanaan – Pergub/SK Gub/SOP)

0 poin

TIDAK ADA
(aplikasi tidak memiliki regulasi)

Bobot : 5

(Bobot RENDAH karena merupakan pendukung kinerja untuk korespondensi dan akun pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

5 poin

AKTIF
(Sudah aktif menggunakan e-Mail @sulbarprov.go.id)

0 poin

BELUM AKTIF
(Belum menggunakan e-Mail @sulbarprov.go.id)

Bobot : 10

(Bobot SEDANG karena merupakan aspek utama penggerak dan pelaksana teknis SPBE)

KATEGORI :

10 poin

BAIK
(Kompetensi SDM IT diatas rata-rata untuk kemampuan : jaringan, aplikasi & multimedia)

7 poin

CUKUP
(Kompetensi SDM IT masih mamadai)

3 poin

KURANG
(Kompetensi SDM IT sangat terbatas)

Bobot : 10

(Bobot SEDANG karena merupakan komitmen dan konsistensi kesuksesan teknis pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

10 poin

BAIK
(Hadir full & aktif pada keg teknis SPBE Diskominfo 5-6W kali/ total 6 keg di 2021)

7 poin

CUKUP
(Hadir sebagian pada keg teknis SPBE Diskominfo 3-4 kali/ total 6 keg di 2021)

3 poin

KURANG
(Jumlah kehadiran pada keg teknis SPBE Diskominfo 0-2 kali/ total 6 keg di 2021)

Bobot : 4

(Bobot KECIL karena merupakan pendukung sosialisasi informasi ke publik dalam pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

4 poin

UPDATE
(Ada Sosial Media kantor dan kontennya update)

2 poin

TIDAK UPDATE
(Ada Sosial Media tapi tidak terupdate)

0 poin

TIDAK ADA
(Tidak Memiliki Sosial Media)

Bobot : 3

(Bobot KECIL karena merupakan bentuk dukungan SPBE dalam pelaksanaan prokes pandemic C-19)

KATEGORI :

3 poin

SUDAH DITERAPKAN
(Sudah menerapkan QR Peduli Lindungi di akses masuk kantor)

1 poin

BELUM DITERAPKAN
(Belum menerapkan QR Peduli Lindungi di akses masuk kantor)

Bobot : 3

(Bobot KECIL karena merupakan pendukung pelaksanaan SPBE)

KATEGORI :

3 poin

SUDAH ADA
(Sudah memiliki perangkat Video Conference sesuai rekomendasi)

1 poin

BELUM ADA/ TERANGGARKAN
(Belum memiliki perangkat Video Conference akan tetapi dianggarkan Tahun 2022)

0 poin

BELUM DIANGGARKAN
(Belum menganggarkan perangkat Video Convergence tahun 2022)

Kategori capaian rapor dukungan SPBE OPD Tahun 2021

BAIK (81 > 100)

1. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (98)
2. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (95)
3. Dinas Kesehatan (84)
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (81)

9,6 %

CUKUP (51 > 80)

1. Dinas Perhubungan (80)
2. Dinas PPPAPP dan KB (78)
3. Dinas Pariwisata (76)
4. Badan Kepegawaian Daerah (76)
5. Inspektorat (74)
6. RSUD Sulbar (73)
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (72)
8. Dinas PUPR (73)
9. Badan Penelitian Pengembangan Daerah (68)
10. Dinas Lingkungan Hidup (65)
11. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Peternakan (61)
12. Badan Penghubung (61)
13. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (58)
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (57)
15. Dinas Pendidikan dan kebudayaan (56)
16. Biro Umum dan Protokoler (54)
17. Dinas Ketahanan Pangan (53)
18. Dinas Kehutanan (52)
19. Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan (52)

45,2 %

KURANG (0 > 50)

1. Sekretariat DPRD (50)
2. Badan Pengembangan SDM (46)
3. Dinas Perpusda (46)
4. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (45)
5. Dinas Kelautan dan Perikanan (45)
6. Biro Hukum (44)
7. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (40)
8. Dinas Transmigrasi (38)
9. Biro Organisasi Dan Tata Laksana (37)
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (37)
11. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (36)
12. Dinas Tenaga Kerja (35)
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (34)
14. Biro Tata Pemerintahan dan Kesra (32)
15. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (32)
16. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (30)
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (25)
18. Dinas Perkebunan (21)
19. Dinas Sosial (14)

45,2 %



PERALATAN JARINGAN INTERNAL DI KANTOR OPD PEMPROV SULAWESI BARAT

Standar

	Nilai
1. Badan Kepegawaian Daerah	30
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan	30
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30
4. Dinas Kehutanan	30
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30
6. Dinas Kesehatan	30
7. Dinas Ketahanan Pangan	30
8. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	30
9. Dinas Lingkungan Hidup	30
10. Dinas Pariwisata	30
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30
15. Dinas Perhubungan	30
16. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	30
17. Inspektorat	30
18. Rumah Sakit Umum Daerah	30
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	30
20. Badan Penghubung	30

Belum Sesuai Standar

	Nilai
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5
4. Biro Hukum	5
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5
6. Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	5
7. Biro Perekonomian dan Pembangunan	5
8. Biro Organisasi Tata Laksana	5
9. Biro Umum	5
10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5
11. Dinas Kelautan Perikanan	5
12. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	5
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5
14. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	5
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5
16. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5
17. Dinas Tenaga Kerja	5
18. Dinas Transmigrasi	5
19. Sekretariat DPRD	5
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
21. Dinas Perkebunan	5
22. Dinas Sosial	5



WEBSITE OPD PEMPROV SULAWESI BARAT

BAIK (Point : 20)
Nilai 81 - 100

	Nilai
1. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	98
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	92
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91
4. Biro Umum	90
5. Dinas Pariwisata	87
6. Biro Perekonomian dan Pembangunan	87
7. Rumah Sakit Umum Daerah	83

CUKUP (Point : 10)
Nilai 51 - 80

	Nilai
1. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	80
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	80
3. Inspektorat	75
4. Dinas Transmigrasi	73
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72
6. Dinas ESDM	72
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	70
8. Badan Pengembangan SDM	68
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	65
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	65
11. Dinas Kesehatan	64
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	64
13. Dinas Tenaga Kerja	60
14. Dinas Lingkungan Hidup	
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	58 58
16. Badan Kepegawaian Daerah	57
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53
18. Biro Organisasi Tata Laksana	52

KURANG (Point : 5)
Nilai 0 - 50

	Nilai
1. Dinas Kelautan Perikanan	50
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46
3. Biro Hukum	44
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda	44
5. Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	44
6. Sekretariat DPRD	41
7. Dinas Perhubungan	29
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28
9. Badan Penghubung	26
10. Dinas Kehutanan	23
11. Dinas Ketahanan Pangan	23
12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	23
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
14. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	5
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
16. Dinas Perkebunan	5
17. Dinas Sosial	5



APLIKASI OPD PEMPROV SULAWESI BARAT

OPD	Jumlah Aplikasi	Regulasi Aplikasi				Total Nilai
		Sistem		Regulasi Aplikasi		
		Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	
1. Inspektorat	1	10	Aktif	5	Ada Lengkap	15
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	10	Aktif	0	Ada Sebagian	13
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
4. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	4	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
5. Dinas Pariwisata	1	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
8. Dinas PPPAPP dan Keluarga Berencana	1	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
10. Dinas Perhubungan	1	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	10	Aktif	0	Tidak Ada	10
12. Biro Umum	6	5	Aktif	5	Tidak Ada	10
13. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	7	5	Aktif Sebagian	3	Ada Sebagian	10
14. Badan Kepegawaian Daerah	6	5	Aktif Sebagian	3	Ada Sebagian	8
15. Biro Hukum Setda	2	5	Aktif Sebagian	3	Ada Sebagian	8
16. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3	5	Aktif Sebagian	3	Ada Sebagian	8
17. Sekretariat DPRD	3	5	Aktif Sebagian	3	Ada Sebagian	8
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	5	Aktif Sebagian	0	Tidak Ada	5
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	5	Aktif Sebagian	0	Tidak Ada	5
20. Biro Perekonomian dan Pembangunan	4	5	Aktif Sebagian	0	Tidak Ada	5
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	5	Aktif Sebagian	0	Tidak Ada	5
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
23. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
24. Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
25. Biro Organisasi Tata Laksana	1	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
27. Dinas Kehutanan	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
28. Dinas Kelautan dan Perikanan	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
29. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
30. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
31. Dinas Kesehatan	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
32. Dinas Ketahanan Pangan	3	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
33. Dinas Lingkungan Hidup	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
34. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	1	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
35. Dinas Perkebunan	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
36. Dinas Sosial	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
37. Dinas Tenaga Kerja	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
38. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
39. Dinas Transmigrasi	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
40. Rumah Sakit Umum Daerah	3	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
41. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2
42. Badan Penghubung	0	2	Tidak Aktif	0	Tidak Ada	2



PENGUNAAN EMAIL go.id OPD PEMPROV SULAWESI BARAT

Aktif

	Nilai
1. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	5
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5
3. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda	5
4. Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda	5
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5
6. Dinas Kelautan Perikanan	5
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5
9. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	5
10. Dinas Lingkungan Hidup	5
11. Dinas Kesehatan	5
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
14. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	5
15. Dinas Perhubungan	5
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5
18. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	5
19. Dinas Transmigrasi	5
20. Inspektorat	5
21. Rumah Sakit Umum Daerah	5
22. Sekretariat DPRD	5

Belum Menggunakan

	Nilai
1. Badan Kepegawaian Daerah	0
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0
5. Badan Pengembangan Sumber Daya	0
6. Badan Penghubung	0
7. Biro Hukum Setda	0
8. Biro Barang dan Jasa Setda	0
9. Biro Organisasi Tata Laksana Setda	0
10. Biro Umum	0
11. Dinas Tenaga Kerja	0
12. Dinas Perkebunan	0
13. Dinas Sosial	0
14. Dinas Kehutanan	0
15. Dinas Ketahanan Pangan	0
16. Dinas Pariwisata	0
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0



SDM SPBE OPD PEMPROV SULAWESI BARAT

OPD	SDM TEKNIS				Total Nilai
	KUALITAS		KEPEDULIAN		
	Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan	
1. Badan Kepegawaian Daerah	7	Cukup	10	Baik	17
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	Kurang	3	Kurang	6
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	Kurang	3	Kurang	6
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	Kurang	10	Baik	20
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan	10	Baik	10	Baik	20
6. Badan Pengembangan Sumber Daya	3	Kurang	10	Baik	13
7. Badan Penghubung	10	Baik	3	Kurang	13
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Cukup	10	Baik	17
9. Biro Hukum Setda	10	Baik	10	Baik	20
10. Biro Barang dan Jasa Setda	7	Cukup	3	Kurang	10
11. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda	3	Kurang	10	Baik	13
12. Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda	3	Kurang	10	Baik	13
13. Biro Organisasi Tata Laksana Setda	10	Baik	10	Baik	20
14. Biro Umum	3	Kurang	10	Baik	13
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10	Baik	7	Cukup	17
16. Dinas Kehutanan	3	Kurang	10	Baik	13
17. Dinas Kelautan Perikanan	10	Baik	10	Baik	20
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	Kurang	3	Kurang	6
19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3	Kurang	10	Baik	13
20. Dinas Kesehatan	10	Baik	7	Cukup	17
21. Dinas Ketahanan Pangan	3	Kurang	10	Baik	13
22. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	10	Baik	10	Baik	20
23. Dinas Lingkungan Hidup	10	Baik	7	Cukup	17
24. Dinas Pariwisata	3	Kurang	7	Cukup	10
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Baik	10	Baik	20
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3	Kurang	3	Kurang	6
27. Dinas PPPAAPP dan Keluarga Berencana	10	Baik	10	Baik	20
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	Kurang	10	Baik	13
29. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Kurang	3	Kurang	6
30. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	3	Kurang	10	Baik	13
31. Dinas Perhubungan	10	Baik	10	Baik	20
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	Kurang	10	Baik	13
33. Dinas Perkebunan	3	Kurang	3	Kurang	6
34. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3	Kurang	7	Cukup	10
35. Dinas Sosial	3	Kurang	3	Kurang	6
36. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	3	Kurang	10	Baik	13
37. Dinas Tenaga Kerja	3	Kurang	10	Baik	13
38. Dinas Transmigrasi	3	Kurang	7	Cukup	10
39. Inspektorat	3	Kurang	3	Kurang	6
40. Rumah Sakit Umum Daerah	3	Kurang	7	Cukup	10
41. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	Kurang	7	Cukup	10
42. Sekretariat DPRD	10	Baik	7	Cukup	17



SOSIAL MEDIA OPD PEMPROV SULAWESI BARAT

Update

	Nilai
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	4
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
5. Biro Organisasi Tata Laksana	4
6. Biro Umum	4
7. Dinas Kelautan dan Perikanan	4
8. Dinas Kesehatan	4
9. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	4
10. Dinas Pariwisata	4
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	4
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
15. Dinas Perhubungan	4
16. Dinas Transmigrasi	4
17. Rumah Sakit Umum Daerah	4
18. Sekretariat DPRD	4

Tidak Update

	Nilai
1. Badan Kepegawaian Daerah	2
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2
5. Dinas Tenaga Kerja	2
6. Inspektorat	2
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2
8. Dinas Kelautan Perikanan	2
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
12. Badan Penghubung	2
13. Dinas Ketahanan Pangan	2
14. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	2
15. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	2
16. Dinas Perkebunan	2

Tidak Ada

	Nilai
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0
2. Biro Hukum	0
3. Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	0
4. Biro Perekonomian dan Pembangunan	0
5. Dinas Kehutanan	0
6. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	0
7. Dinas Lingkungan Hidup	0
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0
10. Dinas Sosial	0



PENERAPAN BARCODE QR PEDULI LINDUNGI OPD PEMPROV SULAWESI BARAT

SUDAH DITERAPKAN

	Nilai
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan	3
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
5. Biro Hukum	3
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3
7. Biro Perekonomian dan Pembangunan	3
8. Biro Umum	3
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3
10. Dinas Kelautan Perikanan	3
11. Dinas Kesehatan	3
12. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	3
13. Dinas Lingkungan Hidup	3
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
18. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	3
19. Dinas Perhubungan	3
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
21. Dinas Tenaga Kerja	3
22. Dinas Transmigrasi	3
23. Inspektorat	3
24. Sekretariat DPRD	3

BELUM DITERAPKAN

	Nilai
1. Badan Kepegawaian Daerah	1
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
4. Badan Penghubung	1
5. Biro Organisasi Tata Laksana	1
6. Dinas Tenaga Kerja	1
7. Dinas Perkebunan	1
8. Dinas Sosial	1
9. Dinas Kehutanan	1
10. Dinas Ketahanan Pangan	1
11. Dinas Pariwisata	1
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1
14. Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	1
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1
18. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	1
19. Rumah Sakit Umum Daerah	1



PERALATAN VIDEO CONFERENCE OPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Sudah ada

Nilai

1.	Badan Kepegawaian Daerah	3
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	3
3.	Biro Hukum	3
4.	Biro Umum	3
5.	Dinas Kesehatan	3
6.	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	3
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3
9.	Dinas Perhubungan	3
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
11.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	3
12.	Inspektorat	3
13.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3
14.	Sekretariat DPRD	3
15.	Badan Penghubung	3

Belum Ada

Nilai

1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
3.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
4.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1
5.	Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	1
6.	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1
7.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1
8.	Dinas Kelautan Perikanan	1
9.	Dinas Kehutanan	1
10.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1
11.	Dinas Pariwisata	1
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
14.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	1
15.	Dinas Transmigrasi	1
16.	Rumah Sakit Umum Daerah	1

Belum Dianggarkan

Nilai

1.	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	0
2.	Dinas Lingkungan Hidup	0
3.	Dinas Tenaga Kerja	0
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0
6.	Dinas Ketahanan Pangan	0
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0
8.	Dinas Perkebunan	0
9.	Dinas Sosial	0
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0
11.	Biro Organisasi Tata Laksana	0
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	0
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0

PEMBIAYAAN SPBE OPD

(Sesuai Perpres 33/2020 & Pergub 25/2021)

Peralatan jaringan



ACCESS POINT

Pemancar signal wifi

4 unit (sesuai cakupan ruangan & jumlah personil)

@Rp. 3.800.000,-



ROUTER

Pengatur distribusi jaringan

1 unit

Rp. 5.000.000,-



KABEL UTP

Penghubung antar alat

1 roll (300 meter)

Rp. 3.789.500,-

**INVESTASI
1 KALI**

Total ± Rp. 23.989.500

Peralatan video conference/ Virtual meeting



TV 65 INCI

Layar tampilan
(pengganti infokus)

1 unit

Rp. 21.275.000,-



WEBCAM STANDAR/TOP

Layar tampilan
(pengganti infokus)

1 unit

Rp. 5.857.500,-

Atau

Rp. 20.000.000,-

**INVESTASI
1 KALI**

Total ± Rp. 41.275.000

Honorarium Tim Pengelola Teknologi informasi/Pengelola Website

◆ Penanggungjawab	Rp. 500.000,- (OB)
◆ Redaktur	Rp. 450.000,- (OB)
◆ Editor/Desain Grafis/ Video Grafis	Rp. 400.000,- (OB)
◆ Admin Web/Jaringan/ Aplikasi/Sosmed	Rp. 350.000,- (OB)
◆ Web Developer	Rp. 300.000,- (OB)
◆ Pembuat Artikel	Rp. 100.000,- (per Halaman)

**Penunjukan Tim ditetapkan dengan SK Gubernur*

**RUTIN
PER TAHUN**

Total ± Rp. 45.600.000

Catatan penting SPBE



Isu SPBE Pemprov Sulbar



Peningkatan Elektronisasi Transaksi Daerah

Peningkatan layanan pemerintah provinsi yang menggunakan transaksi elektronik



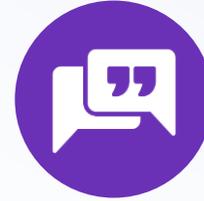
Peningkatan penyerapan teknologi kedalam sistem pemerintahan

Peningkatan jumlah layanan yang menggunakan teknologi informatika / elektronifikasi layanan



Lembaga pemerintahan digital

Proses bisnis yang melembaga sebagai system pemerintahan



Ekosistem dan Supplychain SPBE

Adanya ekosistem dan Supplychain SPBE yang masif dan kompleks akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, Menyiapkan keterhubungan dan integrasi layanan dan data



Peningkatan keamanan dan keandalan layanan digital

Improvement terhadap keandalan, ketersediaan dan keamanan disemua layanan.



BIG DATA

Peningkatan Volume, Verlocity, Variety

Kendala Transformasi Digital Menuju SPBE Terintegrasi Pemprov Sulbar



**Mindset Digital
penyelenggaraan
pemerintahan
masih lemah**



**Penyelenggaraan
SPBE belum
menjadi prioritas
kebijakan dan
kurang
diperhatikan
pimpinan**



**Keterbatasan
Penganggaran**



**Kekurangan SDM
TIK dan tidak
fokusnya
pekerjaan tenaga
yang ditunjuk**

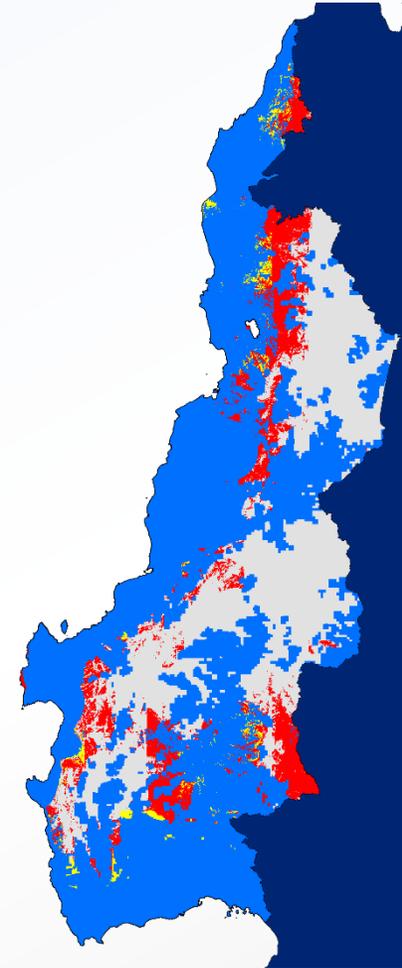


**Masih adanya ego
sektoral dan
sinergitas antar
stakeholder
belum optimal**

Jaringan Infrastruktur TIK Wilayah Sulawesi Barat 2020

LUAS WILAYAH 16.974 KM²

Kab	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk	Jumlah Kel & Desa	Kel & Desa area 4G	Kel & Desa Blank Spot	
						Jumlah	%
Pasangkayu	188.861	3.043	62	63	57	6	9,52
Mamuju	278.764	4.999	55	101	56	45	44,55
Mamasa	163.383	2.909	56	181	71	110	60,77
Polman	478.438	2.022	236	167	154	13	7,78
Majene	174.407	987	184	82	69	13	15,85
Mamuju Tengah	135.280	3.014	44	54	51	3	5,55
Total SULBAR	1.419.233	16.974	83,61	648	458	190	29,32



- 2G** 57,11 % Wilayah
CAKUPAN SINYAL 9.392 KM²
- 3G** 37,58 % Wilayah
CAKUPAN SINYAL 6.181 KM²
- 4G** 60,61 % Wilayah
CAKUPAN SINYAL 9.969 KM²

Jumlah BTS :
781

Panjang Kabel
FO Inland:
1408,5 KM

JARINGAN KOMUNIKASI INTERNET YANG BISA DIGUNAKAN DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

01



Jaringan seluler 4G dengan menggunakan BTS (*Base Transceiver Station*) yang disediakan operator seluler

Diakses: MOBILE
Jalur jalan darat

02



Jaringan kabel FO (*Fiber Optik*) dengan menggunakan kabel yang bentangkan dan disediakan oleh penyedia layanan internet

Diakses: INDOOR
Perkantoran/fasilitas umum

03



Jaringan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) dengan menggunakan satelit mini yang disediakan oleh penyedia layanan VSAT

Diakses: INDOOR/OUTDOOR
Wilayah pedalaman

Langkah solusi optimalisasi SPBE untuk Transformasi Digital

Mindset seluruh stakeholder meningkat melalui optimalisasi literasi

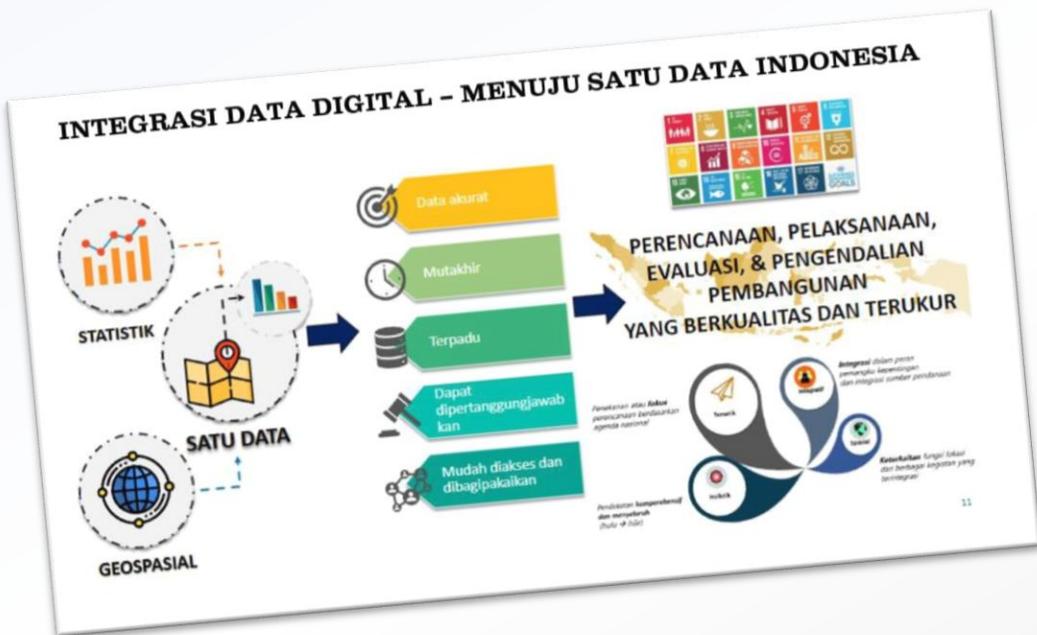
Penyelenggaran SPBE menjadi prioritas Pimpinan

Tersedianya Rencana Induk sebagai panduan pelaksanaan dan penganggaran

Terwujud Sinergitas antar Stakeholder dan berkurangnya ego sektoral

Tata kelola, infrastruktur dan SDM tersedia sesuai dan cukup

Transformasi digital terlaksana melalui implementasi SPBE terintegrasi yang menghasilkan layanan dan data



”

SPBE bukan pilihan tapi keharusan, mempercepat transformasi digital pemerintahan ”

Presiden Jokowi

Senin, 3 Agustus 2020



T E R I M A K A S I H